

BAB V

MODEL PERENCANAAN PENDIDIKAN PARTISIPATIF BERBASIS KEWILAYAHAN DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN INDEKS PENDIDIKAN DALAM MENUNJANG PENCAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROPINSI JAWA BARAT

A. KARAKTERISTIK

Model Perencanaan Pendidikan Partisipatif Berbasis Kewilayahan (PPPBK), merupakan representasi proses perencanaan pendidikan yang melibatkan seluruh kepentingan (*stakeholders*), sebagai alternatif penyempurnaan terhadap model perencanaan yang sudah ada pada saat ini dilengkapi dengan penggunaan Proses Hirarki Analitik (PHA) dalam penentuan prioritas berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Partisipatif, masyarakat dan sektor swasta diikutsertakan di dalam persiapan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan pendidikan maupun di dalam pengoperasian dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunannya. Selain itu rencana, program, dan informasi pembangunan ditempatkan di dalam domain publik (disebar-luaskan). Selanjutnya masyarakat dan sektor swasta diberi kesempatan untuk ikut di dalam pendanaan pembangunan dan dimungkinkan adanya komersialisasi terhadap fasilitas publik yang tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang penting juga adalah bahwa masyarakat diikutsertakan di dalam pengambilan keputusan pada saat pemilihan prioritas. Inisiatif masyarakat dan sektor swasta di dalam pembangunan pendidikan perlu didorong untuk selanjutnya difasilitasi, diarahkan dan diatur.

Karena hal baru/perubahan kearah menjadi lebih baik sehingga untuk dapat diimplementasikan perlu disiapkan strategi dan agenda komunikasi yang efektif khususnya terhadap pihak internal Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Beberapa penjelasan berkaitan dengan Model Perencanaan Partisipatif Berbasis Kewilayahan ini adalah sebagai berikut:

1. Legal dan etikal, dalam hal ini perencanaan dan penganggaran pembangunan pendidikan dilakukan dengan mengacu pada semua peraturan dan norma yang berlaku, menjunjung tinggi etika dan tata nilai masyarakat, tidak memberi peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan serta implementasi rencana pembangunan melalui tata administrasi negara.
2. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, yaitu rencana disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, dalam hal ini masyarakat tahu dan sepakat terhadap apa yang akan dibangun ditinjau dari segi lokasi maupun waktu pembangunan.
3. Interaktif dan dinamis, fokus pada proses perencanaan, bukan pada rencana, rencana pembangunan harus mencerminkan kepentingan dan tata nilai dari semua pihak yang terkait, proses perencanaan pembangunan berlangsung secara berkelanjutan, obyektivitas yang rasional dalam pembangunan perlu dipenuhi dengan penerapan konsep akseptabilitas yang tercermin di dalam subyektivitas yang konsisten. Kondisi masa lampau dan masa kini serta prediksi tentang masa depan akan digunakan sebagai masukan untuk merancang masa depan dan mencari jalan untuk mewujudkannya. Dan yang paling penting tugas perencana bukan lagi merencana untuk orang lain, **tetapi membantu orang lain merencana bagi diri mereka sendiri.**

4. Integratif sinergis, Berkelanjutan, pembangunan terdahulu menjadi persiapan bagi pembangunan lain di masa depan, demokratis, perencanaan pembangunan berlangsung secara demokratis.
5. Holistik, tuntas, komprehensif, dan utuh, simultan, perencanaan pembangunan pendidikan perlu dijalankan secara bersamaan dan menyeluruh pada semua tingkatan; interdependen, perencanaan pembangunan pendidikan dilakukan dengan memperhatikan interaksi yang terjadi di antara pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
6. Wawasan global, tindakan lokal, mau belajar dari pengalaman bangsa lain, bekerja dengan standar internasional, adaptif yaitu pandai memilih untuk ditiru hal-hal yang terbaik dari bangsa lain, untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi lokal sebelum diterapkan serta peka terhadap kondisi lokal.

B. TUJUAN

Tujuan pemodelan Sistem Perencanaan Pendidikan Partisipatif Berbasis Kewilayahan (PPPBK) adalah untuk memperbaiki kinerja perencanaan pendidikan di Propinsi Jawa Barat yang secara langsung akan meningkatkan pencapaian target pembangunan di bidang pendidikan di Propinsi Jawa Barat.

Dari sisi akademik, model berguna untuk menjelaskan fenomena atau obyek-obyek; dalam hal ini model berfungsi sebagai pengganti teori, namun bila teorinya sudah ada maka model dipakai sebagai konfirmasi atau koreksi terhadap teori tersebut. Dari sisi manajerial, model berfungsi sebagai alat pengambil keputusan, komunikasi, belajar dan memecahkan masalah.

C. ASUMSI

Untuk mewujudkan visi dan misi Jawa Barat Tahun 2005- 2025 khususnya dalam bidang pendidikan melalui perencanaan pendidikan partisipatif yang berbasis kewilayahan, dibutuhkan prasyarat:

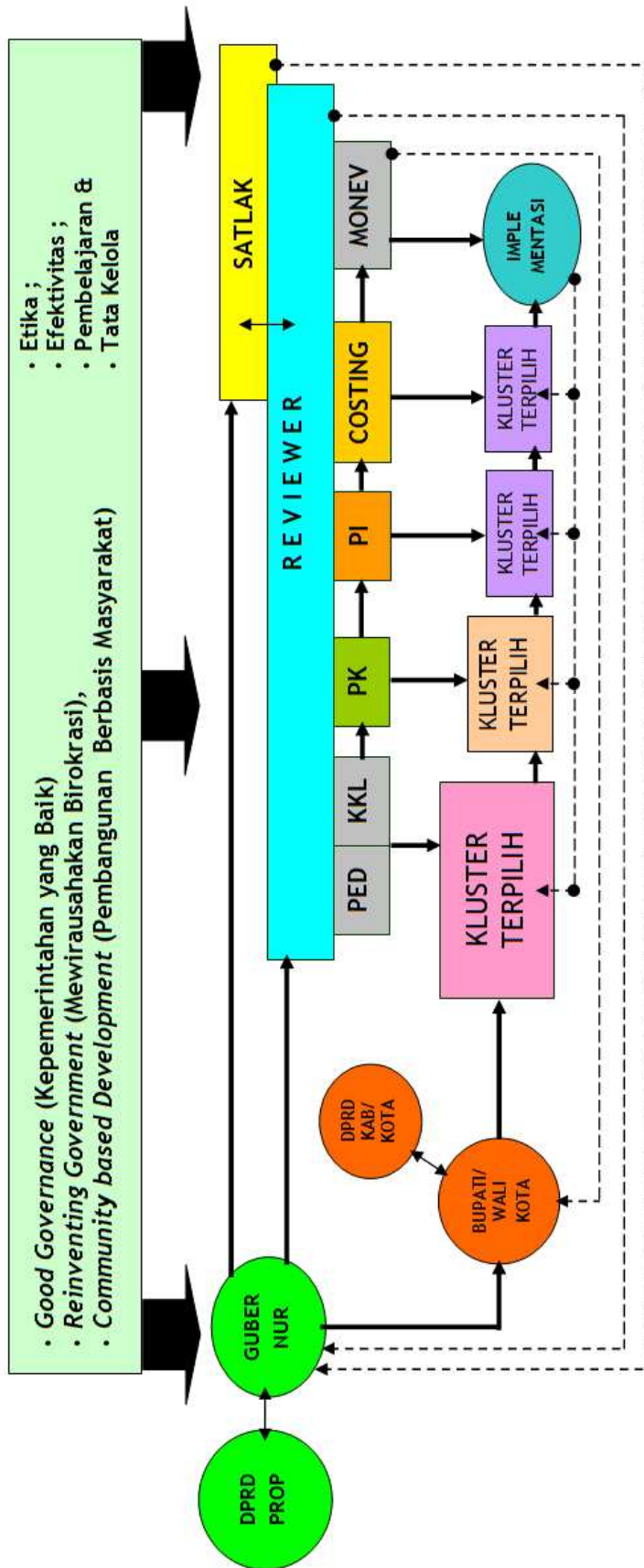
1. Pembagian urusan pendidikan antara pusat, propinsi dan kabupaten/kota sudah sangat jelas sehingga bentuk organisasi pengelola pendidikan, distribusi kuantitas dan kualitas SDM pengelola pendidikan dan penganggaran merupakan implikasi dari kewenangan tersebut.
2. Propinsi merancang dan melaksanakan kegiatan berfokus kepada urusan yang menjadi tanggung jawabnya terutama pertimbangan skala urusan,
3. Model menjadi acuan bersama yang disepakati oleh berbagai pihak terutama kesepakatan antara Pemerintah Propinsi dengan DPRD Propinsi Jawa Barat.
4. Keselarasan visi dan misi (*alignment vision and mission*) antara propinsi dan kabupaten/kota;
5. Komitmen bersama antara propinsi dan kabupaten/kota melalui kepemimpinan Gubernur dan Bupati/Walikota, melalui prinsip-prinsip: kebersamaan (*togetherness*), kemandirian (*selfhelp*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Ketiga prinsip tersebut diwujudkan melalui pendekatan secara komprehensif yaitu: peningkatan modal sosial (*social capital*), pemberdayaan (*empowerment*), tata kelola pemerintahan (*good governance*), membangun saling kepercayaan (*trust each others*), dan komunikasi yang sehat (*health of communication*).

D. KOMPONEN MODEL DAN SALING KETERKAITANNYA

Komponen sistem berperan sesuai dengan fungsinya (Pemimpin dan yang dipimpin, pemerintah dan non pemerintah, pusat dan daerah, perencana, pelaksana, pengendali dsb). Spesialisasi sesuai dengan bidangnya secara profesional sesuai bidang tugasnya. Pemerintah secara bertahap kembali ke *core competency*-nya yaitu regulator, fasilitator sehingga dituntut keandalannya.

Untuk menjamin berjalannya model perencanaan sampai dengan penyusunan anggaran dibuat aturan dan kode etik yang jelas sampai petunjuk teknisnya, hindari toleransi terhadap pelanggaran aturan, keistimewaan-keistimewaan dijelaskan secara terbuka/transparan atau menjadi fasilitas karena jabatan kalau memang diperlukan.

Mekanisme/prosedur penyusunan perencanaan sampai penyusunan program yang didahului oleh penyusunan evaluasi diri, dapat menggunakan model Perencanaan Pendidikan Partisipatif Berbasis Kewilayahan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 5.1
**MODEL PERENCANAAN PENDIDIKAN PARTISIPATIF
 YANG BERBASIS KEWILAYAHAN**

Penjelasan Model

1. Umum :

Untuk mampu mengantisipasi persaingan global dan bervariasinya kondisi serta karakteristik wilayah/daerah, Pemerintah Indonesia memahami pentingnya untuk memberikan hak dan kewenangan berjenjang kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerah secara lebih mandiri melalui pemberian otonomi daerah. Lebih jauh, otonomi daerah merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk penyelenggaraan suatu organisasi pemerintahan yang sehat, efektif, efisien, dan berbasis pada *output* dan *outcomes* serta mampu melakukan kompetisi.

Dalam keleluasaan kewenangan tersebut, pemerintah daerah perlu menyikapinya dengan merancang dan melaksanakan program yang berkualitas dengan akuntabilitas yang tinggi, karena keberlanjutan dari suatu organisasi akan sangat bergantung pada kualitas layanan dari organisasi itu kepada *stakeholders*-nya dan akuntabilitas dari organisasi dalam menggunakan dana publik. Hal ini sejalan dengan perubahan lingkungan strategis yang menuntut adanya perbaikan bagi seluruh organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah untuk dapat memahami dan mengimplementasikan konsep *Good Governance* (kepemerintahan yang baik), *Reinventing Government* (mewirauahakan birokrasi) dan *Community based Development* (pembangunan berbasis masyarakat) yang bermuara kepada peningkatan etika, efektivitas, pembelajaran dan penguatan tata kelola dan demokrasi khususnya di pemerintahan dalam pengelolaan pembangunan pendidikan.

Untuk hal tersebut perlu dibangun budaya yang sesuai dengan kondisi saat ini secara bertahap, melalui perbaikan proses dengan mengimplementasikan Model Perencanaan Pendidikan Partisipatif Berbasis Kewilayahan (PPPBK) sebagai refleksi dan tanggapan pemerintah daerah dalam mengadaptasi perubahan lingkungan strategis dan mengantisipasi masa depan.

Tahap awal pelaksanaan PPPBK, kepada setiap kabupaten/kota pengusul diwajibkan untuk melakukan evaluasi diri sebagai dasar guna menyusun program "pengobatan" terhadap masalah yang dihadapi secara sistematis, dengan didukung oleh studi kelayakan.

PPPBK diharapkan dapat membina kerjasama antar SKPD untuk memenuhi tuntutan memecahkan masalah secara komprehensif, sekaligus diharapkan dapat menggairahkan semangat kabupaten/kota serta SKPD untuk berkompetisi secara sehat dengan menunjukkan keunggulan kinerjanya.

Apabila pemerintah kabupaten/kota telah terbiasa menyusun program berbasis evaluasi dirinya, maka output yang diharapkan adalah pemerintah daerah dapat menyusun rencana program kerja dengan fisibilitas yang tinggi dengan tujuan akhirnya adalah peningkatan IPM daerah guna mendukung pencapaian IPM 80 Jawa Barat pada tahun 2015. Budaya tersebut merupakan fondasi dalam membentuk budaya dan semangat baru dari pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan program secara bertanggungjawab serta akuntabilitas tinggi.

Kemampuan melakukan evaluasi diri serta menyusun rencana kerja dan anggaran dengan fisibilitas tinggi merupakan kemampuan dasar bagi Pemerintah

Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Strategis Jangka Panjang dengan fisibilitas tinggi dalam menghadapi tantangan global.

Setelah budaya tersebut tumbuh, SKPD/pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan program-program dengan menekankan pada pencapaian kualitas yang tinggi.

2. Model Perencanaan Pendidikan Partisipatif Berbasis Kewilayahan (PPPBK)
 - 1) Merupakan model perencanaan untuk bantuan pendanaan bagi program dan kegiatan yang berdampak kepada akselerasi peningkatan IPM Jawa Barat khususnya Indeks Pendidikan, secara berkelanjutan karena melibatkan kepentingan berbagai *stakeholders* yang relevan.
 - 2) Merupakan model untuk menseleksi program yang berbasis aktivitas (*activity-based*) sesuai dengan kebutuhan nyata dengan indikator keberhasilan terukur, inovatif, dan dikelola dengan akuntabilitas tinggi.
 - 3) Model interaktif untuk menyusun program dan dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, swasta, dan komunitas perguruan tinggi setempat.
 - 4) Sumber pendanaan bersifat *on top* diluar pendanaan bantuan reguler dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat, yang dikompetisikan melalui penilaian proposal pengusul, berbasis keunggulan kinerja kabupaten/kota dan memenuhi kriteria seleksi
3. Proposal disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan masyarakat, swasta/dunia usaha, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga

pendidikan tinggi setempat sesuai dengan tahapan seleksi dan diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.

4. Pengusul proposal untuk program diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kluster berbasis pada:
 - 1) Pencapaian IPM oleh kabupaten/kota pada tahun dasar (40%)
 - 2) Peningkatan IPM yang dicapai oleh kabupaten/kota selama 5 tahun terakhir (30%)
 - 3) Pencapaian IPM kabupaten/kota saat ini terhadap target IPM kabupaten/kota yang direncanakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat (30%)
5. Kluster adalah pengelompokkan wilayah kabupaten/kota yang berkompetisi berdasarkan parameter tertentu. Kegunaan kluster adalah untuk menyandingkan suatu wilayah kabupaten/kota pada posisi yang seimbang dan adil dalam berkompetisi dengan wilayah kabupaten/kota lainnya. Masing-masing kluster mempunyai misi pendanaan tertentu yang tidak sama, sesuai dengan tingkat pencapaian IPM-nya. Masing-masing pendanaan dikemas dalam bentuk Program Pendanaan 1 (untuk Kluster 1), PP2 (untuk Kluster 2), dan PP3 (untuk Kluster 3).
6. Tahap seleksi terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu:
 - 1) Tahap Seleksi Proposal Evaluasi Diri (PED)
 - 2) Tahap Seleksi Proposal Komprehensif (PP1/2/3)
 - 3) Tahap Konfirmasi melalui Kunjungan Lapangan (KKL)
 - 4) Tahap Seleksi Proposal Implementasi Program (PIP)

5) Tahap *Costing*

7. Pada setiap tahap seleksi dilakukan penilaian kualitas usulan sesuai dengan dokumen proposal yang disampaikan oleh *reviewer*, berdasarkan kriteria pada masing-masing tahapan yang sudah ditentukan. Hasil seleksi pada setiap tahapan digunakan sebagai dasar rekomendasi calon pemenang program yang diajukan Tim *Reviewer* kepada Gubernur. Tim *Reviewer* bersama Tim Satlak Propinsi pada setiap akhir tahapan melakukan evaluasi untuk bahan perbaikan apabila diperlukan, sehingga menjamin berjalannya tahapan berikutnya sesuai dengan rencana dan melaporkan kepada Gubernur
8. Tim *Reviewer* dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur dengan struktur organisasi terdiri dari:
 - Pimpinan terdiri dari Pengarah/Narasumber Utama, Ketua, Wakil Ketua, dan dua orang Sekretaris Tim *Reviewer* merangkap sebagai anggota.
 - Pimpinan dan Anggota Tim *Reviewer* diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Gubernur. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pimpinan dan Anggota Tim *Reviewer* mengacu kepada Kode Etik Tim *Reviewer* dan peraturan lainnya yang berlaku untuk PPK dan memperoleh imbalan berbasis kinerja.
 - Tim *Reviewer* bertugas untuk melaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi Pasca Program selama 2 (dua) tahun berturut-turut
 - Anggota Tim *Reviewer* terdiri atas unsur masyarakat profesional, unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan unsur perguruan tinggi yang peduli terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Tim *Reviewer* dapat meminta bantuan dari berbagai pihak yang relevan dengan Program sebagai narasumber

9. Satuan Pelaksana (Satlak) Program Propinsi merupakan aparatur pemerintah propinsi yang bertugas melaksanakan perencanaan dan penyelenggaraan administrasi Program pada tingkat propinsi, penyelenggaraan sosialisasi, layanan konsultasi dan pendampingan terhadap para pelaksana program, kompilasi data serta menyusun perencanaan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program.

E. STRATEGI IMPLEMENTASI

Implementasi Model Perencanaan Pendidikan Partisipatif merupakan bagian dari pengelolaan perubahan baik pada lingkungan internal maupun eksternal, sehingga perlu proses komunikasi yang efektif disertai dengan pencitraan.

Setiap kali sebuah perubahan mulai digulirkan, selalu saja muncul dua pihak: mereka yang ketakutan (takut kehilangan jabatan, kehilangan kenikmatan-kenikmatan) terutama di pihak internal dan mereka yang menaruh banyak harapan.

Ekspektasi berubah warna menjadi hasrat harapan antara lain karena proses komunikasi yang dibumbui oleh pencitraan. Harapan sesungguhnya adalah modal yang bagus untuk merangsang perubahan, kalau tujuannya melibatkan mereka sebagai salah seorang aktor dalam perubahan itu sendiri. Tetapi akan menjadi beban manakala peserta pasif dan hanya menunggu atau mendengar.

Oleh karena itu, meski sebagian besar orang memiliki harapan yang realistis, masih banyak orang yang menaruh ekspektasi terlalu tinggi. Ekspektasi dan harapan akan menimbulkan kekecewaan atau kepuasan manakala ia bertemu dengan realitas.

Pemimpin perubahan tentu tidak dapat memenuhi harapan semua orang. Selain karena harapan setiap orang berbeda-beda, kadang-kadang ditemui sejumlah orang yang datang dengan harapan yang berlebihan dan tidak realistis. Tapi manusia umumnya tidak semata-mata menilai apa yang ia terima, melainkan juga upaya-upaya yang telah dilakukan para pemimpin perubahan, pendekatan-pendekatannya, serta pengorbanan-pengorbanan yang diberikan.

Oleh karena itu, pemimpin perubahan bukan hanya perlu mengomunikasikan hasil dari perubahan itu sendiri, melainkan juga upaya-upaya yang sedang dilakukan serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Bahkan dalam banyak hal, para pengikut jauh lebih menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan daripada hasilnya itu sendiri. Dengan kata lain, manusia mampu dan rela menyesuaikan (melakukan *adjustment*) terhadap harapan-harapannya sehingga lebih siap menerima realitas yang berada di bawah harapannya semula, sepanjang ia dapat mengerti faktor-faktor penyebab yang dapat diterima oleh akal.